BANJARESE
PACIFIC INDONESIA
Journal of International Multidisciplinary Research

Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Fajar Rachmad Dwi Miarsa[1], Bambang Panji Gunawan[2], Milatuz Zahroh[3]
Program Studi Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia[123]
Email: *fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id*, bambang.panji@dosen.umaha.ac.id, milatuz_zahroh@student.umaha.ac.id*

Informasi Artikel
E-ISSN : 3026-6874
Vol: 1 No: 1 November 2023
Halaman : 20-27

Keywords:
Community Service Punishment
National Criminal Code
Short-Term Imprisonment

Abstract
This study analyses the regulation of community service punishment under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (National Criminal Code) and identifies the opportunities and challenges of its implementation ahead of the Code's entry into force on 2 January 2026. It employs normative legal research with statutory and conceptual approaches, using materials up to September 2023. The findings show that Article 65 paragraph (1) and Article 85 establish community service as a principal punishment under strict requirements: the offence must carry less than five years of imprisonment, and the judge must impose imprisonment of at most six months or a fine of at most category II, while Article 82 allows it to replace an unpaid fine. Opportunities include the three-year transition period, existing prosecutors and probation officers, community service orders in juvenile justice, and the urgency created by 92 percent prison overcrowding. Challenges include the absence of the Government Regulation mandated by Article 111, potential sentencing disparities, limited reach over narcotics cases, institutional coordination, local budgets, and public stigma. Its novelty lies in mapping regulatory and institutional readiness during the transition. A Government Regulation, Supreme Court sentencing guidelines, and institutional cooperation are needed before the Code takes effect.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) serta mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasinya menjelang berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung bahan sekunder dan data resmi hingga September 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 85 KUHP Nasional menempatkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok dengan syarat formal yang ketat, yaitu ancaman pidana penjara kurang dari lima tahun dan putusan hakim berupa penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II, sedangkan Pasal 82 memungkinkannya menggantikan denda yang tidak dibayar. Peluang implementasinya meliputi masa transisi tiga tahun, tersedianya jaksa dan pembimbing kemasyarakatan sebagai pelaksana, pengalaman pidana pelayanan masyarakat dalam peradilan pidana anak, serta urgensi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan yang mencapai 92 persen. Tantangannya meliputi belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 111, potensi disparitas putusan, terbatasnya jangkauan terhadap perkara narkotika, koordinasi kelembagaan, anggaran, dan stigma masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan rumusan akhir UU 1/2023 dan kesiapan regulasi serta kelembagaan selama masa transisi. Diperlukan Peraturan Pemerintah, pedoman pemidanaan Mahkamah Agung, dan kerja sama kelembagaan sebelum KUHP Nasional berlaku.

Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial; KUHP Nasional; Pidana Penjara Jangka Pendek

PENDAHULUAN

Kelebihan kapasitas *(overcrowding)* lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan merupakan persoalan struktural yang belum terselesaikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR pada 13 Juni 2023, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan bahwa per 12 Juni 2023 jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 269.263 orang,

sementara kapasitasnya hanya 140.424 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas sekitar 92 persen. Lebih dari separuh penghuni tersebut merupakan narapidana perkara narkotika (Ady Thea DA, 2023). Persoalan kelebihan kapasitas ini juga menjadi sorotan dalam kajian mengenai kondisi lembaga pemasyarakatan setelah pandemi Covid-19 (Musa et al., 2023).

Salah satu penyebab kepadatan tersebut adalah dominasi pidana penjara dalam praktik pemidanaan, termasuk untuk tindak pidana ringan yang sebenarnya cukup dijatuhi pidana penjara jangka pendek. Pidana penjara dinilai kurang manusiawi dan turut menyebabkan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, sehingga rancangan KUHP sejak lama mengusulkan pidana kerja sosial sebagai alternatif bagi pidana penjara jangka pendek (Widyastuti, 2020). Pidana penjara jangka pendek tidak memberi cukup waktu untuk pembinaan, tetapi tetap membawa dampak negatif pemenjaraan bagi terpidana. Karena itu, tujuan dan pedoman pemidanaan perlu dirumuskan secara tegas agar pemidanaan diarahkan pada pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial (Irmawanti & Arief, 2021).

Menjawab persoalan tersebut, pembentuk undang-undang memperkenalkan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang diundangkan pada 2 Januari 2023. Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional menempatkan pidana kerja sosial sejajar dengan pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana denda. Gagasan ini sejalan dengan *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures* (Tokyo Rules) yang mendorong negara-negara mengembangkan sanksi nonpemenjaraan (Ulfah, 2021). Berdasarkan Pasal 624, KUHP Nasional baru mulai berlaku tiga tahun sejak diundangkan, yaitu pada 2 Januari 2026. Pemerintah memanfaatkan masa transisi tersebut untuk menyosialisasikan KUHP Nasional dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengannya (Hidayat, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pidana kerja sosial. Ginting (2020) membandingkan sanksi kerja sosial di Belanda, Malaysia, dan Portugal, lalu menyimpulkan bahwa sanksi tersebut mencerminkan keadilan restoratif dan telah mapan di negara-negara itu, sedangkan di Indonesia masih berupa usulan dalam RUU KUHP. Situmeang et al. (2020) menemukan bahwa pidana kerja sosial belum diterapkan secara optimal karena belum ada dasar hukum yang jelas dan lembaga yang mengawasi pelaksanaannya. Igo et al. (2022) menganalisis kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam RUU KUHP, sedangkan Musa et al. (2023) dan Rafsanjani et al. (2023) menilai pidana kerja sosial relevan untuk mengatasi kelebihan kapasitas, dengan catatan diperlukan prosedur yang tertata dan koordinasi antarsubsistem peradilan pidana. Namun, sebagian besar penelitian tersebut disusun ketika pidana kerja sosial masih berupa rancangan atau membahasnya secara konseptual, sehingga belum memetakan secara rinci rumusan akhir UU 1/2023 dan kesiapan pelaksanaannya selama masa transisi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis rumusan akhir pidana kerja sosial dalam UU 1/2023, termasuk fungsinya sebagai pengganti denda dalam Pasal 82, yang dipadukan dengan pemetaan kesiapan regulasi dan kelembagaan selama masa transisi hingga September 2023. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; dan (2) apa saja peluang dan tantangan implementasi pidana kerja sosial menjelang berlakunya KUHP Nasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum positif beserta asas dan doktrin yang melandasinya (Marzuki, 2014). Penelitian menggunakan dua pendekatan. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* digunakan untuk menelaah Pasal 65, Pasal 79, Pasal 82, Pasal 85, Pasal 111, Pasal 621, dan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* digunakan untuk menelaah konsep tujuan pemidanaan, pidana penjara jangka pendek, dan pemidanaan nonpemenjaraan sebagaimana dirumuskan dalam Tokyo Rules.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, serta data resmi dan pemberitaan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan menghubungkan ketentuan normatif dengan kondisi kelembagaan untuk menarik kesimpulan mengenai peluang dan tantangan implementasi pidana kerja sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

KUHP Nasional mengubah struktur pidana pokok yang sebelumnya diatur dalam Pasal 10 KUHP lama, yang mengenal pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pasal 65 ayat (1) KUHP Nasional menetapkan lima jenis pidana pokok, yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Pasal 65 ayat (2) menegaskan bahwa urutan tersebut menentukan berat ringannya pidana, sehingga pidana kerja sosial merupakan pidana pokok yang paling ringan. Masuknya pidana kerja sosial sebagai pidana pokok menandai pergeseran dari pemenjaraan sebagai pidana utama ke arah pemidanaan nonpemenjaraan (Rafsanjani et al., 2023).

Pengaturan rinci pidana kerja sosial terdapat dalam Pasal 85 KUHP Nasional. Unsur-unsur pokok pengaturan tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Unsur Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Nasional

Aspek	Ketentuan	Dasar Hukum
Kedudukan	Pidana pokok, sejajar dengan pidana penjara, tutupan, pengawasan, dan denda	Pasal 65 ayat (1)
Syarat ancaman pidana	Tindak pidana diancam pidana penjara kurang dari 5 tahun	Pasal 85 ayat (1)
Syarat putusan	Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II	Pasal 85 ayat (1)
Besaran denda kategori II	Rp10.000.000	Pasal 79 ayat (1) huruf b
Pertimbangan wajib hakim	Pengakuan terdakwa; kemampuan kerja; persetujuan terdakwa setelah dijelaskan tujuan dan segala hal terkait; riwayat sosial; pelindungan keselamatan kerja; agama, kepercayaan, dan keyakinan politik; kemampuan membayar denda	Pasal 85 ayat (2)
Larangan	Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan	Pasal 85 ayat (3)
Durasi	Paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam	Pasal 85 ayat (4)
Cara pelaksanaan	Paling lama 8 jam per hari; dapat diangsur paling lama 6 bulan dengan memperhatikan mata pencaharian terpidana; dimuat dalam putusan	Pasal 85 ayat (5)–(6)
Akibat tidak dilaksanakan	Terpidana diperintahkan mengulangi kerja sosial, menjalani pidana penjara yang diganti, atau membayar denda yang diganti atau menjalani penjara pengganti denda	Pasal 85 ayat (7)
Pengawasan dan pembimbingan	Pengawasan oleh jaksa; pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan	Pasal 85 ayat (8)
Isi putusan	Lama pidana penjara atau besar denda yang sesungguhnya; jumlah jam per hari dan jangka waktu penyelesaian; sanksi jika tidak dijalani	Pasal 85 ayat (9)
Fungsi pengganti denda	Denda paling banyak kategori II yang tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial	Pasal 82 ayat (1)

Sumber: diolah dari UU Nomor 1 Tahun 2023 beserta Penjelasannya.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pidana kerja sosial memiliki dua lapis syarat formal yang bersifat kumulatif. Lapis pertama bersifat abstrak, yaitu ancaman pidana dalam rumusan delik harus kurang dari

lima tahun penjara. Lapis kedua bersifat konkret, yaitu pidana yang dijatuhkan hakim tidak lebih dari enam bulan penjara atau denda kategori II, yakni paling banyak Rp10 juta. Penjelasan Pasal 85 ayat (1) menegaskan bahwa pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan, yang dapat dilaksanakan di rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga sosial lain dengan sedapat mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Selain sebagai pidana pokok, pidana kerja sosial juga berfungsi sebagai pidana pengganti. Pasal 82 ayat (1) KUHP Nasional menentukan bahwa jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terpidana tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial, sepanjang pidana denda tersebut tidak melebihi kategori II. Ketentuan ini memperluas ruang penggunaan pidana kerja sosial bagi terpidana yang tidak mampu membayar denda, sehingga ketidakmampuan ekonomi tidak otomatis berujung pada pemenjaraan.

Pertimbangan persetujuan terdakwa dan larangan komersialisasi merupakan ciri penting yang membedakan pidana kerja sosial dari kerja paksa. Kedua ketentuan ini sejalan dengan Tokyo Rules, yang dalam Rule 3.9 menegaskan bahwa martabat pelaku yang menjalani sanksi nonpemenjaraan harus dilindungi setiap saat (Ulfah, 2021). Rumusan akhir KUHP Nasional juga menjawab sebagian kritik terhadap rancangan sebelumnya. Widyastuti (2020) mencatat bahwa rancangan KUHP belum mengatur jam minimal harian dan belum menentukan pengawas pidana kerja sosial. KUHP Nasional kini menunjuk jaksa sebagai pengawas dan pembimbing kemasyarakatan sebagai pembimbing melalui Pasal 85 ayat (8), serta menetapkan durasi keseluruhan 8 sampai 240 jam dengan batas paling lama 8 jam per hari, meskipun jam minimal per hari tetap tidak diatur.

Pelaksanaan Pasal 85 masih memerlukan peraturan pelaksana. Pasal 111 KUHP Nasional mengamanatkan bahwa tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110, termasuk pidana kerja sosial, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 621 mewajibkan peraturan pelaksanaan KUHP Nasional ditetapkan paling lama dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, yaitu paling lambat 2 Januari 2025. Sejauh penelusuran penulis hingga September 2023, Peraturan Pemerintah tersebut belum ditetapkan. Pemerintah baru menyatakan akan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan KUHP Nasional dan memasukkan peraturan pelaksana KUHP dalam peta jalan penataan regulasi (Hidayat, 2023; Ady Thea DA, 2023). Pedoman Mahkamah Agung maupun Kejaksaan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan pidana kerja sosial juga belum tersedia, karena KUHP Nasional memang belum berlaku.

Dari sisi kelembagaan, Pasal 85 ayat (8) menempatkan jaksa sebagai pengawas pelaksanaan pidana kerja sosial. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menugaskan jaksa melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan memperoleh landasan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menempatkan penelitian kemasyarakatan dan pembimbingan kemasyarakatan sebagai bagian dari fungsi Pemasyarakatan.

Namun, pengaturan tersebut juga menyimpan persoalan. Karena hakim wajib mempertimbangkan pengakuan terdakwa, pidana kerja sosial cenderung lebih sulit diakses oleh terdakwa yang menggunakan haknya untuk menyangkal dakwaan. Di samping itu, KUHP Nasional tidak merinci jenis pekerjaan, standar keselamatan kerja, maupun instrumen untuk menilai keadaan pribadi dan sosial terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 85 ayat (2). Seluruh aspek teknis tersebut diserahkan kepada Peraturan Pemerintah yang belum terbit, sehingga efektivitas pidana kerja sosial akan sangat bergantung pada kualitas peraturan pelaksana dan konsistensi praktik peradilan.

2. Peluang dan Tantangan Implementasi Menjelang Berlakunya KUHP Nasional

a. Peluang implementasi

Peluang pertama adalah tersedianya masa transisi selama tiga tahun. Pasal 624 KUHP Nasional menunda keberlakuan undang-undang tersebut hingga 2 Januari 2026, sehingga pemerintah, Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki waktu untuk menyiapkan peraturan pelaksana, pedoman teknis, lokasi kerja sosial, dan kapasitas aparat. Pemerintah juga telah memulai sosialisasi KUHP Nasional kepada aparat penegak hukum dan masyarakat (Hidayat, 2023).

Peluang kedua adalah tersedianya lembaga pelaksana dan pengalaman yang serupa. Jaksa dan pembimbing kemasyarakatan telah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga pidana kerja sosial tidak memerlukan pembentukan lembaga baru. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengenal pidana pelayanan masyarakat bagi anak sebagai salah satu bentuk pidana dengan syarat. Perbandingan kedua pidana tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Pidana Pelayanan Masyarakat dan Pidana Kerja Sosial

Aspek	Pidana Pelayanan Masyarakat (UU 11/2012)	Pidana Kerja Sosial (UU 1/2023)
Subjek	Anak yang berkonflik dengan hukum	Terdakwa yang memenuhi syarat Pasal 85 ayat (1)
Kedudukan	Bentuk pidana dengan syarat (Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 2)	Pidana pokok yang berdiri sendiri (Pasal 65 ayat (1) huruf e)
Tujuan	Mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif (Pasal 76 ayat (1))	Alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan (Penjelasan Pasal 85 ayat (1))
Durasi	7–120 jam (Pasal 76 ayat (3))	8–240 jam, paling lama 8 jam per hari (Pasal 85 ayat (4)–(5))
Jika tidak dilaksanakan	Pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas agar anak mengulangi pidana (Pasal 76 ayat (2))	Mengulangi kerja sosial, menjalani penjara yang diganti, atau membayar denda yang diganti (Pasal 85 ayat (7))

Sumber: diolah dari UU Nomor 11 Tahun 2012 dan UU Nomor 1 Tahun 2023.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kedua pidana memiliki karakter yang serupa, yaitu pidana berbasis jam yang dilaksanakan di tengah masyarakat dan dapat diulang jika tidak dijalani. Perbedaannya, pidana kerja sosial berdiri sendiri sebagai pidana pokok dan memiliki konsekuensi yang lebih beragam jika tidak dilaksanakan. Pengalaman pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat bagi anak, termasuk mekanisme pengulangan melalui pejabat pembina dan hakim pengawas, dapat menjadi rujukan awal dalam menyusun mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial.

Peluang ketiga adalah urgensi kelebihan kapasitas yang mendorong dukungan kebijakan. Dengan tingkat kelebihan kapasitas sekitar 92 persen, pemerintah telah menempuh penataan regulasi melalui asimilasi, integrasi, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta memasukkan peraturan pelaksana KUHP dalam peta jalan penataan regulasi (Ady Thea DA, 2023). Pidana kerja sosial dapat melengkapi strategi tersebut di tingkat hulu, yaitu mencegah pelaku tindak pidana ringan masuk ke lembaga pemasyarakatan sejak putusan dijatuhkan.

Peluang keempat adalah tersedianya pengalaman negara lain sebagai pembanding. Ginting (2020) menunjukkan bahwa sanksi kerja sosial telah menjadi alternatif pemidanaan yang mapan di Belanda, Malaysia, dan Portugal. Musa et al. (2023) mencatat bahwa Belanda menerapkan pidana kerja sosial secara luas dan mengalami penurunan tingkat residivisme. Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pembanding dalam menyusun peraturan pelaksana, misalnya mengenai jenis pekerjaan, standar pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan.

b. Tantangan implementasi

Tantangan pertama adalah kekosongan peraturan pelaksana dan potensi disparitas putusan. Hingga September 2023, Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 111 belum ditetapkan, sementara batas waktu dalam Pasal 621 jatuh pada 2 Januari 2025. Tanpa peraturan pelaksana dan pedoman pemidanaan, hakim berpotensi menafsirkan syarat dan pertimbangan dalam Pasal 85 secara berbeda-beda. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa pidana kerja sosial sulit diterapkan secara optimal apabila tidak didukung dasar hukum yang jelas dan lembaga yang mengawasi pelaksanaannya (Situmeang et al., 2020).

Tantangan kedua adalah terbatasnya jangkauan pidana kerja sosial terhadap sumber utama kelebihan kapasitas. Lebih dari separuh penghuni lapas dan rutan adalah narapidana perkara narkotika (Ady Thea DA, 2023), sementara sebagian ketentuan pidana narkotika memuat ancaman yang jauh

melampaui syarat Pasal 85. Sebagai contoh, kepemilikan narkotika Golongan I bukan tanaman diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, pidana kerja sosial tidak dapat menjadi satu-satunya solusi kelebihan kapasitas dan perlu didampingi kebijakan lain, misalnya rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Tantangan ketiga adalah koordinasi dan kapasitas kelembagaan. Pasal 85 ayat (8) membagi peran antara jaksa sebagai pengawas dan pembimbing kemasyarakatan sebagai pembimbing. Pembagian peran ini menuntut prosedur yang tertata, koordinasi antarsubsistem peradilan pidana, dan kompetensi aparat yang memadai (Rafsanjani et al., 2023). Jumlah pembimbing kemasyarakatan dan anggaran operasional Bapas juga perlu disesuaikan dengan potensi pertambahan klien setelah KUHP Nasional berlaku.

Tantangan keempat adalah kesiapan anggaran dan lokasi pelaksanaan. Pasal 85 ayat (3) melarang pelaksanaan pidana kerja sosial dikomersialkan, sehingga lokasinya harus berupa kegiatan sosial seperti rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga sosial lain sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 85 ayat (1). Penyediaan lokasi tersebut memerlukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga sosial, termasuk pembiayaan alat kerja, perlindungan keselamatan, dan pengawasan harian, yang perlu direncanakan sejak masa transisi.

Tantangan kelima adalah penerimaan masyarakat. Dari sudut sosiologi hukum, pidana kerja sosial dinilai sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia (Widyastuti, 2020). Namun, pelaksanaan kerja sosial di ruang publik tetap berpotensi menimbulkan pelabelan terhadap terpidana, padahal Tokyo Rules menekankan perlindungan martabat pelaku yang menjalani sanksi nonpemenjaraan (Ulfah, 2021). Jika tidak dikelola dengan baik, pelabelan justru bertentangan dengan tujuan reintegrasi sosial yang hendak dicapai.

c. Rekomendasi penguatan

Berdasarkan peluang dan tantangan tersebut, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan selama masa transisi:

1. Pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana diamanatkan Pasal 111 KUHP Nasional, sesuai batas waktu dalam Pasal 621, yang mengatur jenis pekerjaan, standar keselamatan, mekanisme koordinasi jaksa dan Bapas, serta pelaporan pelaksanaan.
2. Mahkamah Agung perlu menyiapkan pedoman pemidanaan pidana kerja sosial, misalnya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, yang memuat kriteria pemilihan, contoh amar putusan, dan penggunaan hasil penelitian kemasyarakatan sebelum KUHP Nasional berlaku.
3. Kejaksaan perlu menyusun pedoman pengawasan pelaksanaan pidana kerja sosial yang terintegrasi dengan pembimbingan oleh Bapas.
4. Bapas perlu menjalin nota kesepahaman dengan pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Sidoarjo dan daerah lain di Jawa Timur, untuk menyiapkan lokasi kerja sosial disertai alokasi anggaran dalam APBD.
5. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi perlu menyosialisasikan pidana kerja sosial kepada masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap terpidana.

KESIMPULAN

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menempatkan pidana kerja sosial sebagai pidana pokok melalui Pasal 65 ayat (1) dan mengaturnya secara rinci dalam Pasal 85. Pidana ini hanya dapat dijatuhkan jika tindak pidana diancam penjara kurang dari lima tahun dan hakim menjatuhkan penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II. Selain itu, Pasal 82 memungkinkan pidana kerja sosial menggantikan denda paling banyak kategori II yang tidak dibayar. Pertimbangan persetujuan terdakwa, larangan komersialisasi, dan individualisasi pertimbangan hakim menegaskan karakter pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Kedua, menjelang berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026, pidana kerja sosial memiliki peluang berupa masa transisi tiga tahun, tersedianya jaksa dan pembimbing kemasyarakatan sebagai

pelaksana, pengalaman pidana pelayanan masyarakat dalam sistem peradilan pidana anak, dukungan kebijakan untuk mengatasi kelebihan kapasitas, dan pengalaman negara lain sebagai pembanding. Tantangannya meliputi belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Pasal 111 hingga September 2023, potensi disparitas putusan, terbatasnya jangkauan terhadap perkara narkotika, koordinasi dan kapasitas kelembagaan, kesiapan anggaran dan lokasi, serta risiko stigmatisasi terhadap terpidana.

Berdasarkan simpulan tersebut, pemerintah disarankan segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sesuai batas waktu Pasal 621 KUHP Nasional. Mahkamah Agung dan Kejaksaan disarankan menyiapkan pedoman penjatuhan dan pengawasan pidana kerja sosial sebelum KUHP Nasional berlaku. Pemerintah pusat dan daerah juga disarankan menyiapkan kerja sama dengan Bapas serta anggaran pelaksanaan, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk mengukur kesiapan aparat penegak hukum dan efektivitas pidana kerja sosial setelah KUHP Nasional berlaku.

REFERENCES

Ady Thea DA. (2023, 14 Juni). Penataan regulasi, cara pemerintah membenahi overcrowded rutan dan lapas. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/penataan-regulasi-cara-pemerintah-membenahi-overcrowded-rutan-dan-lapas-lt648948a46a507/

Ginting, J. (2020). Sanksi kerja sosial sebagai alternatif bentuk pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia. *Law Review, 19*(3), 246–267. https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2098

Hidayat, R. (2023, 24 Februari). Melihat 3 cara pemerintah sosialisasi KUHP baru. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-3-cara-pemerintah-sosialisasi-kuhp-baru-lt63f83686792e5/

Igo, M., Amiruddin, & Ufran. (2022). Kebijakan formulasi dalam RUU KUHP terhadap pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. *Jurnal Education and Development, 10*(2), 707–713. https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3*(2), 217–227. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.

Musa, M., Elvina, E., & Yanti, E. (2023). Criminal social work to overcome overcapacity in post-pandemic prisons. *Yuridika, 38*(1), 51–72. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i1.37962

Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). The existence of community service punishment in a progressive legal perspective. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23*(2), 219–230. https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.219-230

Situmeang, S. M. T., Pane, M. D., & Wahyudi. (2020). Optimalisasi peran penegak hukum dalam menerapkan pidana kerja sosial dan ganti rugi guna mewujudkan tujuan pemidanaan yang berkeadilan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27*(3), 501–525. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art4

Ulfah, M. (2021). Pidana kerja sosial, Tokyo Rules, serta tantangannya di masa mendatang. *Jurnal Magister Hukum Udayana, 10*(3), 517–535. https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5332).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
United Nations General Assembly. (1990). *United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)*, Resolution 45/110.
Widyastuti, B. (2020). Kajian pidana kerja sosial ditinjau dari segi sosiologi hukum. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS, 8*(2), 56–63. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49756